



KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengantar Redaksi

Salam pembaca,

Organisasi pemerintahan dituntut selalu berinovasi untuk meningkatkan layanan publik. Tahun 2021 merupakan tahun perubahan bagi sebagian besar instansi pemerintah pusat. Perubahan tersebut diantaranya adalah adanya transformasi pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.

Adanya perubahan tersebut, tentunya akan merubah sistem kerja di pemerintahan, salah satunya adalah dalam perencanaan kerja. Awal tahun merupakan waktu yang tepat dalam membuat perencanaan kerja untuk waktu setahun. Bentuk perencanaan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Salah satu artikel Warta PUSTAKA Nomor 1 Tahun 2021 mengulas tentang penyusunan SKP sebagai bentuk perencanaan yang baik bagi kinerja ASN.

Informasi menarik lain yang disajikan dalam edisi ini diantaranya mengenai: Sistem pengendalian Intern, Akreditasi perpustakaan khusus, temu teknis pustakawan kementan, tanaman obat, Bioindustri pertanian terintegrasi.

Sistem pengendalian intern sebagai bagian dari manajemen organisasi merupakan topik menarik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Akreditasi perpustakaan merupakan bagian penting dalam pengakuan segara legal kualitas sebuah perpustakaan. Pembahasan terkait akreditasi perpustakaan menjadi penting untuk mendorong perpustakaan lingkup Kementan menjadi perpustakaan terakreditasi.

Temu teknis pustakawan adalah agenda tahunan untuk melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi antar pustakawan di seluruh unit kerja Kementan. Isu terkait tanaman obat dimasa pandemi Covid 19 menjadi topik menarik bagi sebagian besar masyarakat. Diangkatnya pembahasan mengenai manfaat tanaman obat menjadi daya tarik tersendiri saat ini. Pertanian berbasis bioindustri terintegrasi merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan hasil pertanian sehingga meminimalisir limbah. Virtual literacy mengenai pertanian bioindustri menjadi wawasan dalam pengelolaan pertanian.

Warta PUSTAKA merupakan bentuk media komunikasi warga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Melalui Warta PUSTAKA berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh PUSTAKA diulas dengan lebih mendalam agar dapat bermanfaat lebih dari sekedar informasi yaitu dapat menjadi pengetahuan. Karya-karya inovasi dari PUSTAKA akan selalu terupdate di sini.

Selamat membaca.

Tanaman Obat Herbal Berkhasiat

Masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai jenis tanaman obat dari masa ke masa. Berbagai cerita khasiat tanaman obat telah banyak dibuktikan secara empiris maupun keilmuan. Beranekaragam tanaman obat di nusantara perlu dikenali, dibudidayakan dan dicoba khasiatnya.

Penggunaan tanaman obat di Indonesia bukanlah sebuah cerita baru. Khasiat berbagai tanaman obat di Indonesia telah dikenal di setiap daerah. Bahkan setiap daerah biasanya memiliki ciri khas tanaman obat tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Berbagai informasi tanaman obat nusantara ini harus selalu di explore untuk dapat diinformasikan kepada generasi penerus agar dapat melestarikan keberadaannya dan memanfaatkan berbagai khasiat yang terkandung di dalamnya.

Tanaman obat dipercaya turun temurun dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit, lalu apa saja khasiat serta bagaimana pemanfaatannya? Disampaikan dalam acara *Virtual Literacy (VL)* yang di gelar Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) beberapa waktu lalu, Syamsul Hidayat peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan bahwa tanaman obat diklasifikasikan menjadi tiga, yang pertama adalah tanaman obat tradisional, dimana khasiatnya telah dipercaya secara turun temurun, contohnya *purwaceng* sebagai obat kuat, yang kedua adalah tanaman obat modern, merupakan tanaman yang secara ilmiah dapat dibuktikan kandungan senyawa atau bioaktifnya dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis contohnya *herba meniran* yang dikemas untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, dan ketiga tanaman obat potensial yaitu tanaman obat yang diduga memiliki khasiat obat akan tetapi belum dibuktikan secara ilmiah atau medis contohnya *qist al hindi*.



Lebih lanjut Syamsul mengungkapkan bahwa tanaman obat dapat dikenali melalui warna, bentuk, rasa, aroma, hubungan kekerabatan, sifat, nama daerah dan perilaku. Misalnya warna merah untuk mengobati penyakit berhubungan dengan darah, warna kuning untuk pencernaan, putih berhubungan dengan luka, gigi/tulang, Warna hijau berhubungan dengan stamina dan kesegaran tubuh.



Tanaman obat yang berbentuk jantung untuk penyakit jantung, bentuk seperti ginjal untuk mengobati sakit ginjal, bentuk limpa untuk mengobati penyakit limpa, bentuk paru-paru untuk mengobati paru-paru, bentuk bibir untuk mengobati bibir. Berikutnya dapat dikenali juga dari rasa tanaman, rasa pahit bersifat menstabilkan, rasa manis menenangkan, rasa asam merangsang dan menetralkan, rasa asin melunakkan dan menghancurkan. Tanaman obat bersifat antikembang bahan menggembung seperti bawang dan *rhizome*. Dilihat dari nama daerah misalnya akar wangi untuk mengobati bau mulut, daun encok untuk rematik.

Tanaman obat dapat juga dikenali dari aromanya, yaitu tanaman obat untuk senyawa aromatik biasanya memiliki khasiat menenangkan dan memiliki efek relaksasi pada otot misalnya gandapura dan sereh wangi. Aroma untuk campuran makanan agar menjadi wangi dan sedap misalnya pandan dan kayumanis. Tanaman obat yang aromanya digunakan untuk mengobati masuk angin, keseleo, digigit serangga yaitu kayu putih. Aroma untuk mengobati gigi dan mulut yaitu cengkeh. Aroma untuk mengobati bau badan yaitu *Litsea cubeba*.

Selain khasiatnya Syamsul juga menyampaikan bahwa tantangan dalam budidaya tanaman obat di Indonesia antara lain beberapa spesies mulai sulit ditemukan serta, sulit dibudidayakan secara konvensional sehingga harus dilakukan dengan sistem organik, selain itu pasar tumbuhan bahan obat masih terbatas.

Sementara itu Peneliti dari Badan Litbang Pertanian, (Balitbangtan), Oti Rostiana, menyampaikan bahwa terdapat empat tujuan pemanfaatan tanaman obat yaitu untuk tujuan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya disampaikan beberapa contoh pemanfaatan tanaman obat, diantaranya temulawak bermanfaat menambah nafsu makan, memperbaiki fungsi hati, meningkatkan ketahanan tubuh.

Pemanfaatan temulawak pada bagian rimpang dapat dilakukan dengan diparut kemudian diperas, diseduh, dalam bentuk instan atau minuman. Kunyit bermanfaat misalnya menjaga stamina dan antivirus. Cara pemanfaatannya mudah, yaitu rimpang segar diparut kemudian diminum atau digerek selanjutnya di seduh. Jahe bermanfaat memperlancar peredaran darah, memperbaiki fungsi pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh serta mengatasi batuk. Cara pemanfaatannya dengan cara di geprek kemudian di seduh, dibuat minuman instan. Jambu biji bermanfaat meningkatkan trombosit, imunostimulan. Pemanfaatannya dengan dikonsumsi segar atau di jus. Meniran bermanfaat mengatasi diare, demam, radang ginjal. Pemanfaatannya dengan cara dimanfaatkan segar atau utuh.

(reporter: *Eni Kustanti, Shinta*)

Pustaka Adalah Kiblat Bagi Pengelolaan Perpustakaan Khusus

“PUSTAKA merupakan satu-satunya Perpustakaan Eselon II di Kementerian, keberadaannya menjadi sorotan serta acuan bagi perpustakaan khusus yang lain dalam pengelolaan informasi”

Perpustakaan khusus sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan memiliki ciri khas yaitu subjek informasinya spesifik sesuai instansi yang menaunginya. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) sebagai perpustakaan khusus di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), merupakan penyedia informasi pertanian utama di Indonesia. Kekhasan sumber informasi tersebut harus terus dikembangkan guna mendukung percepatan pembangunan pertanian. Pengelolaan sumber informasi pertanian di Kementan tidak hanya dilakukan oleh PUSTAKA, akan tetapi juga oleh perpustakaan lingkup Kementan RI. Oleh karena itu koordinasi dan sinergisitas selalu dilakukan di perpustakaan khusus lingkup Kementan dengan PUSTAKA sebagai lokomotifnya.

Guna meningkatkan koordinasi antar pustakawan di lingkup Kementan, setiap tahun dilakukan kegiatan Temu Teknis pengelola perpustakaan. Temu Teknis juga bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dan kinerja pengelolaan perpustakaan di lingkup Kementan yang diikuti oleh pejabat fungsional pustakawan/petugas pengelola perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian. Temu Teknis Tahun 2021 telah dilaksanakan pada akhir bulan Februari lalu,

Tahun ini Temu Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan juga melibatkan pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus dari Kementerian dan Lembaga lainnya untuk memperkuat jejaring perpustakaan dengan mengambil tema “Optimalisasi Pengembangan Perpustakaan Digital untuk Meningkatkan Daya Guna Informasi Pertanian”.



Pada kesempatan tersebut redaksi Warta Pustaka menyempatkan untuk mewawancarai salah satu narasumber yaitu Bapak Chaidir Amir, S.Sos., M.A., pustakawan ahli muda sekaligus juga Kapokja Perpustakaan dan Edukasi Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekjen Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI). Chaidir

telah cukup akrab dengan PUSTAKA karena beberapa kali diundang untuk mengisi acara misalnya dalam Knowledge Sharing Kepustakawanan.

Dalam pernyataannya, Chaidir mengatakan *“Pustaka ini kan menjadi kiblat ya, saya kalau ke pimpinan selalu bawa-bawa nama PUSTAKA, Kementan loh Pak Eselon II. Kami sebetulnya banyak belajar dari Pustaka. Kayak temu teknis ini, kami belum bisa melakukan karena dengan berbagai keterbatasan, anggaran terbatas dan segala macam, belum bisa seperti ini. Pustaka saya harap bisa terus eksis, biar bisa menjadi kiblat kita juga bahwa ada perpustakaan setingkat eselon II di lingkungan Kementerian karena memang sekarang tinggal Pustaka saja yang eselon II, yang lainnya apalagi kita ya eselon IV juga udah ngga ada”*

Chaidir menyampaikan beberapa saran untuk PUSTAKA dalam pengembangan perpustakaan digital. Pertama, pentingnya penyamaan persepsi mengenai arah perpustakaan. Perubahan dari perpustakaan konvensional menuntut adanya perubahan dari pustakawan. Pustakawan harus mampu mendefinisikan perubahan tersebut, apa yang ingin dicapai step by step setiap tahunnya. Sehingga harus ada arah tujuan yang terukur dan capaian bisa terukur.

Kedua, keterlibatan pimpinan menjadi hal penting, seperti yang dilakukan di Kemendikbud juga beberapa kali mengadakan acara yang khusus pimpinan meskipun ada beberapa yang menugaskan pustakawan kembali, akan tetapi memang perlu ada acara seperti itu dan perlu melaporkan ke pimpinan dari setiap kegiatan termasuk hasil-hasil yang sudah didapatkan. Penyamaan frekuensi dengan pimpinan menjadi bagian penting, sehingga ketika perpustakaan mengadakan suatu inovasi akan mudah mendapatkan dukungan.

Sebagai Sekjen FPKI pusat Chaidir menyampaikan perannya dalam mensinergiskan jejaring perpustakaan khusus Indonesia agar dapat berkolaborasi. Diantaranya melakukan komunikasi

dengan Perpustakaan untuk membuat grand design perpustakaan khusus meskipun belum selesai. Hal ini menjadi cukup rumit karena jumlah perpustakaan khusus itu banyak. Kementerian jumlah perpustakaannya sangat besar karena ada UK/UPT di bawahnya, masiha ada BUMN, masjid, gereja, perusahaan yang berarti jumlahnya belum terhitung semuanya. Hal ini berarti harus ada definisi yang jelas untuk perpustakaan khusus, selama ini definisinya masih umum dari perpustakaan. Selain itu Chaidir menyampaikan bahwa perpustakaan khusus dapat berkolaborasi juga dengan jenis perpustakaan lain yang bisa diprakarsai perpustakaan umum yang memiliki wewenang mengkoordinasikan perpustakaan di wilayahnya. Misalnya Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta berkolaborasi dengan perpustakaan khusus Kementan di Jakarta, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi di wilayahnya. Berjejaring itu menjadi penting karena sumber informasi bisa digunakan bersama-sama.

Terkait dengan repository, Chaidir menyampaikan bahwa untuk membangun repository yang paling penting adalah kebijakannya, karena untuk membuat sistem itu mudah, banyak yang berkompeten untuk mengerjakannya. Hal yang paling penting adalah harus jelas dulu adalah definisi kebijakannya, repository mau dibuat seperti apa, kegunaannya untuk apa, komponennya apa saja. Pengalaman di Kemendikbud saat membangun repository, ketika kebijakannya sudah jelas dan pimpinan mau menandatangani selanjutnya dibuat edaran sehingga memiliki dasar yang kuat. Setelah memiliki kebijakan selanjutnya dapat mengembangkan sistem. Ketika pimpinan mengetahui manfaat dari repository, maka perpustakaan akan dijadikan acuan dalam mendokumentasikan informasi lembaga.

Hal yang penting dari repository adalah membuat indeksasi, untuk meningkatkan aksesnya. Karena kalau tidak ada indeksasi yang memanfaatkan hanya orang-orang di lingkungan lembaga sendiri padahal peluang atau kesempatan untuk diakses terbuka luas. Kalau misalnya ada

anggaran bisa menggunakan goole asenee atau sejenisnya untuk meningkatkan akses repository, sehingga orang-orang yang sering membuka artikel pertanian akan terkirim informasi secara otomatis untuk mengakses ke repository.

Chaidir menegaskan bahwa saat ini kita sudah tidak dapat mengharapkan orang untuk datang ke perpustakaan, oleh karena itu perpustakaan yang harus mendatangi pemustakanya dengan membuat berbagi layanan, berbagai sistem yang memungkinkan perpustakaan hadir di komputernya, di gadgetnya, di laptopnya yang biasa digunakan sehari-hari. Kelihatannya sederhana, akan tetapi kita harus menyiapkan berbagai hal untuk itu. Pesan Chaidir untuk pustakawan *“Jangan melakukan apa yang biasa dilakukan tapi lakukanlah yang bisa*

dilakukan”. Pustakawan harus berani berubah mencoba melakukan hal-hal baru, tidak hanya fokus pada satu pekerjaan tapi harus berani mencoba melakukan pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Adanya perubahan paradigma perpustakaan maka pustakawan juga harus berubah.

Mengembangkan repository mungkin bukan hal yang sulit, tapi yang paling sulit adalah menyatukan energi untuk dapat memiliki arah yang sama. Hasil wawancara dengan Chaidir tersebut merupakan salah satu pijakan untuk menciptakan loncatan yang lebih jauh dalam membangun dan mengembangkan perpustakaan digital di PUSTAKA.

(reporter: vit/wied/ekt)

Akreditasi Menjadi Kunci Eksistensi Perpustakaan

“Akreditasi menunjukkan pengakuan legal atas kinerja perpustakaan, semakin baik hasil akreditasi menunjukkan semakin baik juga kualitas sebuah perpustakaan”



Saat ini “akreditasi” menjadi hal yang cukup di buru oleh perpustakaan untuk menunjukkan eksistensinya di mata publik. Perpustakaan yang sudah terakreditasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang belum terakreditasi. Jika selama ini akreditasi seolah menjadi target utama bagi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi untuk mendukung akreditasi lembaganya, ternyata hal ini tidak sepenuhnya benar. Perpustakaan khusus harus juga menunjukkan eksistensinya melalui akreditasi perpustakaan karena ini merupakan salah satu bentuk jaminan layanan yang akan diberikan kepada lembaga induknya maupun kepada publik.

Seperti diungkap oleh Kepala Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA), Abdul Basit dalam kegiatan knowledge sharing yang di gelar PUSTAKA beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa perpustakaan khusus lingkup Kementerian Pertanian, penting untuk mempersiapkan akreditasi agar sesuai standar nasional.



Menurutnya akreditasi bertujuan untuk mendapatkan pengakuan yang sah/ legal sampai mana tingkat kemajuan kinerja perpustakaan. Selain itu status akreditasi dapat digunakan untuk menyusun skala prioritas pembinaan yang dilakukan oleh PUSTAKA secara bertahap terhadap perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Akreditasi juga akan memicu institusi perpustakaan dan institusi induknya untuk mengelola perpustakaan dengan baik. Beliau juga menyampaikan harapannya agar perpustakaan tidak cukup hanya sesuai standar tetapi harus meningkatkan layanan melalui kinerjanya, bahkan pernyataan 'perpustakaan sebagai supporting' meningkat menjadi 'perpustakaan sebagai trigger dalam pelaksanaan program dan kegiatan di instansi penanggungnya'.

Lebih lanjut ia mengungkapkan sampai saat ini ada 96 perpustakaan khusus lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi yang berbeda-beda. Dari 96 perpustakaan, baru 4 perpustakaan yang sudah terakreditasi. Oleh karena itu, Pustaka sebagai perpustakaan pembina lingkup Kementan perlu melakukan pemetaan agar pembinaan lebih fokus dan terarah sesuai dengan kebutuhan masing-masing perpustakaan, untuk akselerasi peningkatan kinerja menuju perpustakaan yang terakreditasi.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Standarisasi & Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Supriyanto menyampaikan harapan dari Perpusnas agar PUSTAKA selaku pembina perpustakaan di lingkup Kementerian Pertanian dan sebagai perpustakaan yang telah terakreditasi nilai A dapat memicu perpustakaan-perpustakaan lainnya dengan melakukan pendampingan dan pembinaan dalam hal akreditasi perpustakaan. Selain itu juga supaya program akreditasi dapat masuk dalam roadmap pengembangan perpustakaan unit Kementan, misalnya per tahun ada 10 – 20 perpustakaan, sehingga dalam jangka waktu maksimal 10 tahun seluruh perpustakaan lingkup Kementan telah terakreditasi. Perpustakaan khusus cenderung tertinggal dalam hal capaian akreditasi dibandingkan jenis perpustakaan lainnya. Penyebab rendahnya akreditasi di perpustakaan khusus biasanya adalah karena belum maksimalnya kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang mewajibkan perpustakaan K/L di lakukan akreditasi Perpustakaan, kedua komponen perpustakaan belum dimasukkan sebagai indikator untuk penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Lalu bagaimana manfaat, tahapan dan strategi menuju sukses akreditasi? Asesor Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Tisyo Haryono menjelaskan manfaat akreditasi perpustakaan diantaranya menjamin konsistensi kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan, mendapatkan pengakuan formal dari lembaga yang berwenang, mendapatkan kepercayaan publik, meningkatkan kepercayaan diri, menambah nilai jual

lembaga induk. Dijelaskan juga bahwa dalam proses akreditasi terdiri dari 7 tahapan yaitu 1. pembinaan dari dinas perpustakaan provinsi, kab/kota, 2. Pendaftaran, 3. Penilaian borang, 4. visitasi, 5. resume dan hasil visitasi, 6. rapat pleno, 7. Pemberian sertifikat akreditasi.

Dijelaskan Tisyo bahwa instrumen akreditasi perpustakaan khusus terdiri dari 81 pertanyaan dari 6 komponen kegiatan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) terbaru yang harus dipersiapkan. Komponen pertama adalah koleksi yang mencakup diantaranya kebijakan pengembangan koleksi, survei kebutuhan, alat seleksi, jenis dan jumlah koleksi, database, standar pengolahan, sistem otomasi, penyiangan, pelestarian. Komponen kedua sarana prasarana yang mencakup gedung, luas tanah dan bangunan, lokasi yang strategis, pencahayaan, katalog, rak buku, meja kursi, peralatan multimedia dan elektronik, jaringan otomasi, fasilitas umum (mushola, toilet). Komponen ketiga pelayanan perpustakaan yang mencakup jenis layanan, sistem peminjaman, penelusuran, otomasi layanan, website, keanggotaan, pengunjung, peminjaman, jenis dan jumlah promosi, kegiatan literasi, peran dalam mengurangi plagiarisme. Komponen keempat tenaga perpustakaan yang mencakup status dan pendidikan kepala perpustakaan, jumlah dan status tenaga perpustakaan, jumlah SDM yang sudah sertifikasi perpustakaan, keikutsertaan dalam organisasi profesi. Komponen kelima, penyelenggaraan dan pengelolaan meliputi kebijakan perpustakaan secara tertulis, SK pendirian perpustakaan, struktur

organisasi, program kerja, laporan, anggaran, sumber anggaran, partisipasi masyarakat, kerjasama internal dan eksternal. Komponen keenam penguat terdiri dari inovasi/kreativitas, keunikan, prestasi/apresiasi, komitmen pimpinan.

Tisyo juga menyampaikan kiat dan strategi agar sukses dalam proses akreditasi yaitu 1. pahami dengan baik standardisasi dan akreditasi dalam penyelenggaraan/pengelolaan perpustakaan, 2. laksanakan dengan benar semua ketentuan SNP terkait, 3. pastikan bahwa semua kegiatan didukung dengan ketersediaan dokumen baik prosesnya maupun hasilnya, 4. Lakukan self - assessment berdasarkan instrumen, 5. siapkan bukti fisik menurut urutan komponen instrument, 6. daftarkan ke Sekretariat LAP-N (lampirkan instrumen dan bukti fisik selengkap mungkin), 7. jelaskan secara ringkas, jujur, dan profesional saat ada kegiatan visitasi asesor, 8. penuh keyakinan dan percaya diri (optimis).

Sukses akreditasi ditentukan oleh kesiapan perpustakaan dalam memenuhi seluruh ketentuan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) berikut kelengkapan bukti fisiknya. Perpustakaan berkualitas adalah perpustakaan yang mampu menyelenggarakan *“Excellent Services”: Customer Satisfaction, Recognition, and Continuous Improvement*.

(reporter: listi, shinta, ekt)

Sistem Kendali Internal Organisasi Di Era Digital

Era digital menuntut berbagai perubahan termasuk dalam pengelolaan organisasi. SPI sebagai sistem kendali internal organisasi harus ikut bertransformasi di era digital dengan mengalihmediakan dokumen dalam bentuk digital.



Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika didukung dengan lancarnya sistem kendali internal. Sistem ini merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu organisasi, untuk menjamin kegiatan dalam sebuah organisasi dilaksanakan dengan baik dan didukung dokumen administrasi yang lengkap. Pada organisasi pemerintahan, sistem kendali internal dikenal dengan nama Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI sebagai sebuah sistem pada dasarnya merupakan proses yang berjalan terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan maupun seluruh pegawai dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat disampaikan bahwa melalui SPI maka sistem internal organisasi dapat dipantau keberhasilannya melalui bukti-bukti dokumen yang ada.

Sebagai salah satu organisasi pemerintahan, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) juga menerapkan SPI yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset negara. Pelaksanaan SPI mengacu pada Pedoman Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA-018.01.1.418329/2020 Tanggal 12 November 2019 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Untuk menjamin pelaksanaan SPI tersebut, setiap tahun dilakukan penilaian terhadap sistem. Ruang lingkup penilaian SPI ada 5 (lima) unsur yaitu 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan.

Pertama, lingkungan pengendalian meliputi: organisasi, kebijakan, sumber daya manusia (SDM), prosedur. Dalam ruang lingkup lingkungan pengendalian tersebut, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Kedua, penilaian risiko dilakukan organisasi terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan (pemantauan dan evaluasi) kegiatan dengan menciptakan strategi

operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Ketiga, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan SPI, terdapat 3 (tiga) tahapan kritis yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu tahap persiapan penyusunan dan implementasi SPI, serta tahap monitoring dan evaluasi SPI.

Keempat, informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta disampaikan tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Informasi dan komunikasi meliputi : pencatatan dan pelaporan.

Kelima, kegiatan pemantauan merupakan pemantauan pengendalian intern untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan rekomendasi hasil audit dan review telah ditindaklanjuti. Pimpinan instansi berkewajiban menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan dapat berupa tindakan administratif dan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan meliputi tindakan administratif dan penyelesaian kerugian negara.

Dalam penilaian SPI dibutuhkan dokumen pendukung guna memastikan sistem telah berjalan dengan baik. Perkembangan era digital saat ini, membawa banyak perubahan dalam administrasi suatu organisasi, yaitu dokumen selain dalam bentuk tercetak disimpan juga dalam bentuk digital. Dokumen digital memiliki keunggulan yaitu tidak membutuhkan ruang banyak dalam penyimpanan, mudah dalam pencarian dan bisa menekan biaya pencetakan dokumen serta mudah untuk dibawa suatu saat dibutuhkan karena berbentuk soft copy

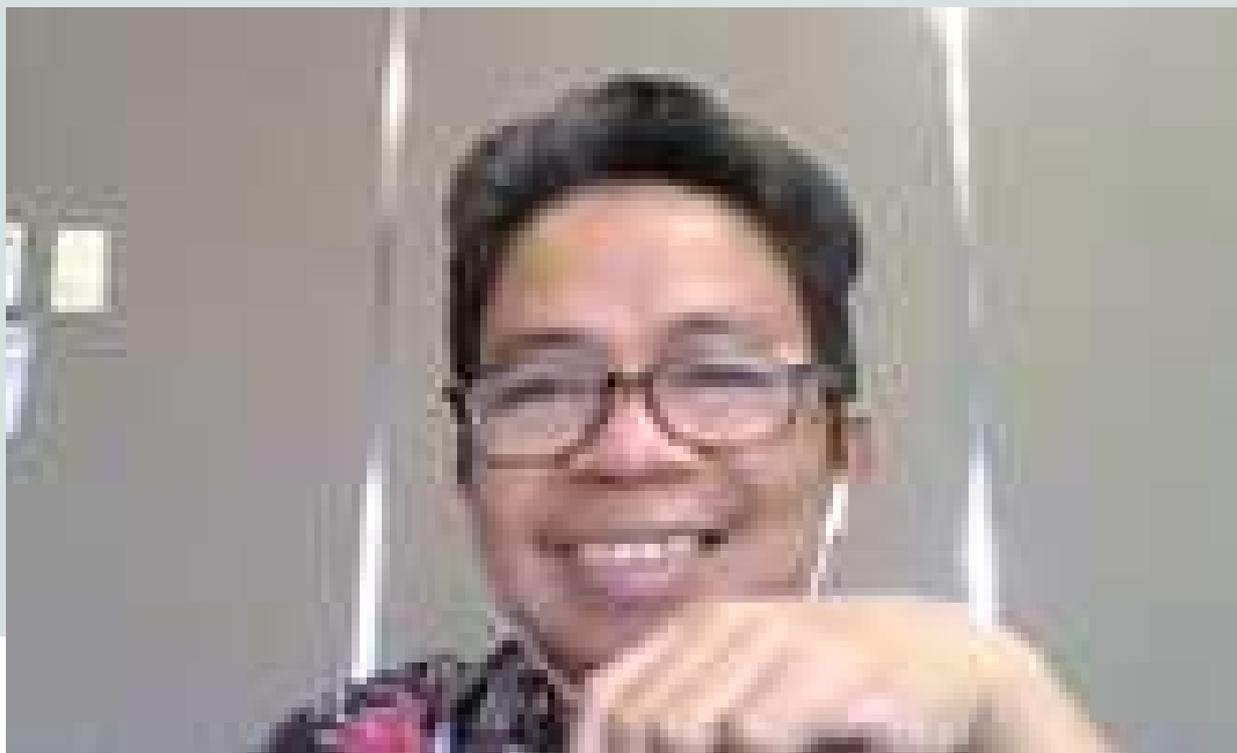


berupa file. Dalam pengelolaan SPI, telah dilakukan digitalisasi dokumen dengan maksud mempermudah pencarian dokumen jika dibutuhkan dan menghindari dokumen yang hilang.

Pencarian dokumen yang didigitalisasi lebih mudah ditemukan karena dalam penelusuran dokumen digital cukup menggunakan kata kunci yang terkait dengan dokumen yang dimaksud atau menggunakan kata kunci nama penyimpanan dokumen. Pada SPI di PUSTAKA, dokumen yang didigitalisasi berasal dari empat kelompok substansi di PUSTAKA yaitu (1) Umum, (2) Program dan Evaluasi, (3) Perpustakaan dan (4) Penyebaran Teknologi Pertanian. Dokumen yang telah dikonversi dalam bentuk digital selanjutnya diupload dan disimpan pada drive pustaka.go.id. Sampai saat ini jumlah dokumen yang telah diupload sebanyak 432 dokumen, yang berasal dari substansi umum 140 dokumen, substansi program dan evaluasi 21 dokumen, substansi PTP 128 dokumen, substansi Perpustakaan 57 dokumen, dokumen SPK sebanyak 33 dokumen dan faktur pajak 53 dokumen.

Kegiatan digitalisasi dokumen tersebut dilakukan oleh Tim SPI PUSTAKA secara rutin sebulan sekali atau pada waktu-waktu tertentu ketika diperlukan terutama jika akan dilakukan audit baik internal maupun eksternal. Keberhasilan SPI tentunya akan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, sehingga proses pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh pihak yang terkait.

(reporter: suryono, eni)



Bioindustri Pertanian Terintegrasi Solusi Atasi Limbah Pertanian

Ketika mendengar kata Bioindustri mungkin yang terlintas adalah sebuah industri besar, namun Kementerian Pertanian mencoba mewujudkan konsep Bioindustri skala petani, melalui sebuah model yang diberi nama Bioindustri Pertanian terintegrasi ternak. Salah satu tujuan pengembangan model ini adalah untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan dan mengatasi pencemaran yang berasal dari limbah pertanian.

Model ini telah mengangkat kesejahteraan kelompok tani, dengan prinsip memanfaatkan limbah sehingga menekan biaya serendah mungkin. Jumlah penduduk yang kian meningkat menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan serta meningkatnya kebutuhan pangan, untuk mengatasi hal tersebut perlu ada suatu upaya revolusi hijau untuk mengatasi polusi serta pencemaran limbah yang disebabkan oleh limbah pertanian, serta perlu adanya usaha untuk meningkatkan produktivitas pangan secara

signifikan, untuk itulah upaya pembangunan ekonomi pertanian dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kearifan alam sangat diperlukan.

Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Pertanian (Kementan) tengah fokus menyiapkan langkah strategis dengan menerapkan sistem bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian.

Usaha pertanian kedepan harus efisien dan berkelanjutan, ciri pertanian berkelanjutan harus ramah lingkungan. Jangan sampai merusak sumberdaya hayati, kedua hal ini menjadi prasyarat suksesnya pertanian ke depan dengan ditopang oleh teknologi, Sistem pertanian ini merupakan keterpaduan berjenjang dan sistem pertanian pada tingkat mikro, sistem rantai nilai terpadu pada tingkat industri dengan sistem agribisnis terpadu pada tingkat industri atau komoditas, prinsip bioindustri berbasis masyarakat, lingkungan alam, pelaku agribisnis berorientasi pengembangan usaha pertanian rakyat serta berbasis sumberdaya lokal.

Melalui Balitbangtan, Kementerian Pertanian telah menerapkan model ini, sudah banyak dihasilkan komponen, paket serta model teknologi. Model usaha tani, efisien dan berkelanjutan tersebut dikemas dalam bentuk pertanian bioindustri. "Penyampaian teknologi harus terus-menerus, berkembang terus, disinilah peran Virtual Literacy (VL) yang digelar Pustaka berfungsi untuk selalu meng-update perkembangan teknologi.

Sementara itu Peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, Agus Hermawan mengungkapkan bahwa ada beberapa yang menjadi ciri umum dalam perkembangan bioindustri. Pertama yaitu memanfaatkan semua komponen yang ada seperti limbah, jerami, sekam, dedak, ini semua dapat dimanfaatkan jika diolah dengan teknologi yang ada, dalam pertanian bioindustri memanfaatkan semua limbah, meski belum sampai zero waste.

Kedua adalah mengurangi input produksi dari luar, misalnya penggunaan pupuk yang biasa membeli dari luar cukup memanfaatkan sendiri limbah yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kegiatan peternakan berupa bioindustri yang dikelola dengan baik, yang keempat berupa aktifitas saling terkait sehingga mengefisienkan kegiatan itu sendiri. Pertanian Bioindustri tidak hanya pertanian besar namun dapat juga dimanfaatkan sebagai skala kelompok tani.

Selanjutnya Agus mengungkapkan bahwa Prinsip dasar bioindustri sesuai dengan namanya industri di bidang pertanian, jika biasanya hanya terfokus pada

1 komoditas, bioindustri terintegrasi rangkaiannya menjadi panjang sehingga limbah menjadi nol, limbah kita olah kemudian sisanya kita olah lagi, jika dahulu terbatas padi sapi, jerami jadi pakan ternak pupuk dan urin untuk memupuk tanaman bioindustri tidak sekedar itu, jerami yang awalnya jadi pakan ternak bisa diubah jadi bioethanol, jerami bisa untuk memproduksi jamur, sebelum ke kompos jadi belud selanjutnya jadi kompos, tidak melihat komoditas yang biasa tetapi sudah berkembang menjadi maggot, semua limbah diolah menjadi produk baru.

Kemudian Agus menambahkan bahwa bioindustri di Indonesia berbeda dengan luar negeri jadi lebih sederhana, ada 6 prinsip limbah meminimalisir, input, energi mengolah limbah menjadi bioproduk berekonomi tinggi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang sesuai perkembangan zaman.

Jika melihat literatur bioindustri dari luar negeri lebih kepada bio atau industri. Bagaimana industri besar berbasis pertanian, hibrida, GMO, tingkat petani disesuaikan dengan 6 prinsip tadi sehingga, jangan berfikir prinsip dasar tentang pertanian ada 5.

Untuk model percontohan di Jawa Tengah, Indonesia ada 5 yang menjadi binaan BPTP Jawa Tengah 1 berada di KP, 4 berada di Sragen, di tempat ini diterapkan model percontohan bioindustri pertanian terintegrasi ternak untuk tanaman padi dan sapi, kemudian Boyolali ditempatkan model bioindustri terintegrasi ternak untuk tanaman kopi dan sapi perah, selanjutnya di Magelang, ada bioindustri terintegrasi ternak untuk tanaman sayuran dan sapi kemudian di grobogan ada bioindustri tanaman pajale dan sapi potong, daerah tersebut dipilih karena model tersebut dapat diterapkan di berbagai agroekosistem seperti dataran tinggi, dataran rendah dan dipilih daerah dengan komoditas strategis serta unggulan.

Bioindustri sistem pertanian yang pada prinsipnya mengelola dan/atau memanfaatkan secara optimal seluruh sumberdaya hayati termasuk biomasa dan/atau limbah organik pertanian, bagi



kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara harmonis. Salah satu unit kerja yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Jawa Tengah). Untuk mengenalkan konsep tersebut Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi pertanian (PUSTAKA) bekerjasama dengan BPTP Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Grobongan menggelar kegiatan virtual literacy pada tanggal 19 Februari 2021.

Prinsip dasar Bioindustri pertanian yang akan dilaksanakan adalah

1. Pertanian nol limbah
2. Pertanian nol imported input produksi
3. Pertanian nol imported energi
4. Pertanian pengolah biomasa dan limbah jadi bio-produk baru bernilai tinggi
5. Pertanian terpadu ramah lingkungan
6. Pertanian sebagai kilang biologi (biorefinery) berbasis iptek maju penghasil pangan dan non pangan

Scaling Up di Tingkat petani untuk wilayah Jawa Tengah

- Model Sistem Pertanian Bioindustri Berbasis Integrasi Padi-sapi di Sragen-Jawa Tengah (2015-2017). Model ini menerapkan integrasi

padi dan sapi di Desa Seren Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, kegiatan disini dilakukan oleh kelompok tani , mereka mengolah MOL untuk pupuk organik, mol untuk fermentasi jerami dan pakan, pembuatan biogas dimana semua produk yang dihasilkan berasal dari peternakan dan pertanian.

- Model Integrasi Tanaman Kedelai dan Ternak Menuju Sistem Pertanian Bioindustri di Lahan Sawah Tadah Hujan (2016-2017), model ini dilakukan di Desa Toroh Kecamatan Boloh Kabupaten Grobogan, kegiatan disini meliputi budidaya tanaman pajale, pengolahan limbah pajale, pembuatan Mol rumen untuk fermentor dan dekomposer, fermentasi limbah tanaman.
- Pangan, pengomposan kotoran sapi, produk olahan berbasis kedelai, produk olahan berbasis jagung.
- Model Sistem Pertanian Bioindustri Berbasis Sapi Perah di Jawa Tengah (2015-2017), model ini dilakukan di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, kegiatan disini adalah pemeliharaan sapi perah, dan budidaya kopi, dari pemeliharaan sapi perah menghasilkan pengolahan susu, es krim dan yogurt. Dari limbah sapi perah dapat menghasilkan biogas, pembuatan kompos (POP) dan biourin (POC), dari budidaya kopi menghasilkan kopi pupuk.
- Model Bioindustri Berbasis Sapi-sayuran, dataran tinggi di Jawa Tengah (2016-17). Model ini dilakukan di Desa Sumberejo, Ngablak



Magelang, kegiatan disini meliputi pengembangan mikroorganisme local/MOL Rumen, MOL rumen sebagai fermentor, limbah kandang untuk biogas dan pemanfaatan slurry sebagai POC dan POP, pengelolaan limbah kandang, pembuatan MOL rumen sebagai

dekomposer, pupuk dan pestisida organik, budidaya sayuran dalam screen, kebun bibit sehat, agensia hayati, peningkatan nilai tambah packing dan pemasaran oleh koperasi.

(reporter: shinta, eni)

Besok Harus Lebih Baik Dari Hari Ini

Pencapaian kinerja yang baik tentunya harus didukung dengan perencanaan yang matang. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan bentuk perencanaan kinerja pegawai di awal tahun yang akan menjadi indikator keberhasilan kinerja selama setahun.

“Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini”

kalimat tersebut menjadi salah satu judul novel terlaris yang ditulis oleh Marchella MP. Namun, berbeda dengan Marchella, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) Abdul Basit, memiliki quote khusus untuk menyemangati karyawannya. “Besok Harus lebih Baik dari Hari ini” ungkapnya yang disampaikan dalam kegiatan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kehadiran tahun 2020 pada 23 Desember 2020.

Guna menjamin terselenggaranya organisasi pemerintahan yang produktif, perencanaan kinerja pegawai merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ada pepatah yang mengatakan “apabila kita gagal merencanakan maka kita telah merencanakan kegagalan.” Hal tersebut merupakan nasehat yang mendalam maknanya. SKP sebagai wujud dari bentuk perencanaan tentunya harus dipersiapkan secara matang sehingga dapat mencerminkan kinerja organisasi.

Selanjutnya Basit berpesan agar setiap karyawan memiliki rencana kerja apa yang harus dilakukan agar target kinerjanya dapat tercapai. Menurutnya SKP individu merupakan bagian SKP institusi, “Tidak ada satu orang pun yang membuat SKP terlepas dari institusi yang di koordinasikan melalui atasan langsungnya” ujarnya.

Hal ini berarti diperlukan koordinasi agar setiap karyawan memahami perannya dalam organisasi dan mengetahui output apa yang dihasilkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Apabila kegiatan individu sudah terorganisir dengan baik, maka bukan sesuatu yang sulit untuk mendapatkan hasil kinerja terbaik.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Agung Danang Rahardi. Dalam penjelasannya Danang mengungkapkan bahwa aspek evaluasi kinerja pegawai berawal dari penyusunan rencana kinerja pegawai, selanjutnya proses pengukuran kinerja pegawai, kemudian dilakukan validasi data kinerja pegawai.

“SKP berisi tugas jabatan perjanjian kinerja (PK) selanjutnya pemetaan butir kegiatan sesuai dengan cascading (penjabaran) dari jabatan pimpinan tinggi

sampai dengan fungsional dan pelaksana, sehingga target perjanjian kinerja harus sesuai dengan PK yang ditandatangani” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga ia mengungkapkan bahwa absensi dan kinerja pegawai Pustaka sudah mendekati ideal. Selanjutnya ia berpesan agar para pegawai di tahun 2021 menjadi lebih baik, sehingga target Kementerian Pertanian mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen dapat segera terealisasi.

Pada tahun 2021, semua pegawai Pustaka melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan transformasi jabatan, kewajiban menyusun SKP harus tetap dilaksanakan, Jangan jadikan transformasi sebagai hambatan. Pengisian SKP tahun 2021 memang sedikit berbeda dari pengisian SKP Sebelumnya, jika sebelumnya pengisian SKP

dapat di lakukan kapanpun kini pengisian SKP harus sesegera mungkin. Jika sebelumnya para fungsional berada di bawah jajaran struktural, kini dengan adanya transformasi para fungsional berada di bawah komando sub koordinator substansi yang memiliki tugas sama dengan fungsional profesional. Garis yang nampak tidak garis tegas melainkan garis putus-putus sehingga ke depan akan muncul kelompok kerja sesuai dengan keahlian para fungsional.

Perubahan dapat terjadi kapan saja, setiap pegawai harus mempersiapkan diri dengan perubahan yang ada. Seseorang dapat dikatakan produktif jika hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari pada hari ini.

(reporter: Shinta)

Pengarah

Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran
Teknologi Pertanian

Penanggung Jawab

Kordinator Substansi Penyebaran Teknologi Pertanian

Dewan Redaksi/Redaktur

Ketua

Eni Kustanti, S.Pi., M.I.Kom

Anggota

Sigit Sayogya, S.E.

Dr. Vivit Wardah Rufaidah, S.Si., M.P.

Widaningsih, S.S.

Muhammad Zuhdi S., S.Sos.

Shintawati Octaviani, S.Sos.

Suryono, S.P.

Lutfiyanti, S.Kom.

Redaksi Pelaksana

Penyunting/Eitor

Dhira Anindya Nirmala, S.S.

Desain Grafis

Asep Gumelar, A. Md

Sekretariat

Slamet Sutriswanto, A. Md

Istiana Mustika, S.E

